Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Volume 9, Edisi 1, Januari-Juni 2017
P-ISSN: 2339-2088   E-ISSN: 2599-2023

Relasi antara Sastra dan Politik (*Analisis Unsur-unsur Politik dalam Puisi Masa Dinasti Umayyah*)

Bobbi Aidi Rahman
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
(*bobbiaidirahman@gmail.com*)

ABSTRAK

Literary and political relations are seen in the Umayyah Dynasty period of government. Politics greatly dominated the development of literature, particularly poetry. This is affected by upheavals and political tendencies that dominate the lives of the people. Along with the emergence of political factions or sects, some poets emerge to support several political sects. Every poet cannot be separated from political functions as they loyally support their sects or political parties, both publicly and secretly. Some even have to act hypocrisy by saying something that is not believed, opposing their feelings for the authorities and salvation, or for expecting rewards from the *khalifah*.

Keywords : *Literature, politics, Umayyah Dinasty, Khalifah*

A. Pendahuluan

Sastra merupakan bentuk karya seni yang lahir dari gejolak dan dorongan dari dalam diri manusia untuk mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan perasaan yang terdapat di dalam jiwanya.[1] Menurut M. Atar Semi, sastra merupakan pencerminan

[1]Definisi sastra secara universal belum menemukan kesepakatan, tetapi Teeuw mencoba memberikan pemahaman sastra. Menurut Teeuw, kesusastraan asal katanya *sastra*, yang barasal dari bahasa Sanskerta. Kata *sas* berarti mengarahkan, mengajarkan atau mendidik, dan memberi arahan atau instruksi. Sedangkan akhiran *tra* artinya alat atau sarana. Kemudian awalan *su* berarti baik dan indah. Sehingga kata susastra sama maknanya dengan kata *belles-lettres* dalam bahasa Perancis dan Inggris yang bermakna tulisan yang indah. A. Teeuw,

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupannya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Sastrawan tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterima dari lingkungan yang membesarkannya sekaligus membentuknya,[2] sehingga karya sastra tersebut tidak pernah lepas dari pengaruh realitas kehidupan yang mengitarinya.

Pandangan pemahaman sastra di atas memiliki persamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Zainuddin Fananie. Menurut Fananie, karya sastra merupakan satu refleksi lingkungan budaya dan suatu teks dialektika antara pengarang dan situasi sosial yang membentuknya, atau merupakan penjelasan sejarah dialektik yang dikembangkan dalam karya sastra.[3] Karya sastra selalu terkait dan berhubungan langsung dengan kajian teks, maka usaha yang

---

Sastra dan Ilmu Sastra (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), Cet. Ke-1, 23. Sementara dalam kesusastraan Arab, kata sastra berarti *adab* (أدب). Kata *adab* dalam bahasa Indonesia bermakna kehalusan, kesopanan, kebaikan budi pekerti atau akhlak. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-4, Edisi III, 6. Sedangkan kata *adab* (أدب) dalam bahasa Arab, memiliki arti yang beragam dari masa ke masa. Pada masa Ja>hiliyyah kata *adab* berarti mengundang untuk menyantap makanan, karena tradisi semacam ini merupakan suatu perbuatan yang amat terpuji. Masa permulaan Islam Kata *adab* diartikan sebagai kata yang mengadung pendidikan, baik lisan maupun tindakan (akhlak). Sebagaimana sabda Rasulullah saw أدبنى ربي فأحسن تأديبي artinya *"Tuhanku telah mendidikku, kemudian menyempurnakan pendidikanku"*. Pada masa Bani Umayyah kata adab mempunyai arti pengajaran, sehingga kata mu'allim diartikan sama dengan kata muaddib, yaitu orang-orang yang bertugas memberikan pelajaran tentang puisi, khutbah, sejarah orang-orang Arab, mulai dari keturunan mereka sampai kepada peristiwa-peristiwa yang mereka alami pada masa Jahiliyyah dan masa Islam. Namun para sastrawan sepakat bahwa sastra atau *adab* merupakan seni dalam mengungkapkan kata-kata dengan indah. Shawqi Dayf, *Tarikh al-Adab al-'Arabi al-'Ashr al-Jahili* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), Cet. Ke-24, 7-8. Hanna al-Fakhuri, *Tarikh al-Adab al-'Arabi* (t.tp: Maktabah al-Bulisiyah, 1987), Cet. Ke-12, 34. Ibn al-Athir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar* (t.tp: Dar al-Fikr, 1979), Cet. Ke-2, Juz II, 30.

[2]M. Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra* (Bandung: Angkasa, 2012), Edisi Revisi, 92.

[3]Zainuddin Fananie, *Telaah Sastra* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), Cet. Ke-2, 3.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

dilakukan oleh seseorang untuk dapat mengerti, memahami, dan menilai teks sastra tidak hanya bergantung kepada teori sastra saja, tetapi persoalan-persoalan yang terdapat di luar teks, seperti persoalan politik, sosial, agama, dan sebagainya, yang seringkali mewarnai dasar bangunan karya sastra yang diciptakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teks-teks sastra sebenarnya merupakan karya yang amat kompleks. Karena pada dasarnya, sastra merupakan refleksi dan fenomena kehidupan manusia dengan berbagai macam dimensi yang ada.[4] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan cerminan atas penggambaran suatu masa atau zaman, dimana setiap masa atau zaman memiliki persoalan dan kecenderungan yang berbeda-beda. Persoalan dan kecenderungan tersebut akan tercermin dalam karya sastra yang muncul pada zaman tersebut.

B. Pembahasan

Dalam kesusastraan Arab, sastra (*adab*) itu terbagi kepada dua bagian, *pertama*, *al-adab al-washfi* (sastra deskriptif/non-imajinatif/non-fiksi), dan *kedua*, *al-adab al-insha'i* (sastra kreatif/fiksi). *Al-adab al-washfi* terbagi pada tiga bagian, yaitu sejarah sastra (*tarikh al-adab*), kritik sastra (*naqd al-adab*), dan teori sastra (*nazhariyah al-adab*). Objek kajian dari sastra deskriptif adalah bahasa seorang sastrawan ketika ia mengungkapkan pandangannya, baik dalam bentuk penjelasan maupun kritik terhadap hasil karya sastra kreatif dan memberikan penilaian secara objektif.[5] Sedangkan *al-adab al-insha'i* terbagi pada tiga bagian, yaitu puisi (*al-shi'r*), prosa (*al-nathr*), dan drama (*al-masrahiyyah*). *Al-adab al-inshai* merupakan ekspresi bahasa yang indah, baik dalam bentuk puisi, prosa, maupun drama yang menggunakan gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa biasa,

---

[4]Atmazaki, *Ilmu Sastra Teori dan Terapan* (Padang: UNP Press, 2007), 82.

[5]Akhmad Muzakki, *Kesusastraan Arab: Pengantar dan Teori* (Jakarta: ar-Ruzz Media, 2006), 55.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Volume 9, Edisi 1, Januari-Juni 2017
P-ISSN: 2339-2088   E-ISSN: 2599-2023

karena bahasanya mengandung makna rasa, imajinasi, dan pikiran.[6] Maka dengan demikian, dapat diketahui bahwa puisi Arab dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis *al-adab al-insha'i* (sastra kreatif).

Perkembangan sastra tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur yang membelatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya sebuah karya sastra, karena pada dasarnya karya sastra tersebut dipengaruhi oleh unsur intrinsik (dalam) dan unsur ekstrinsik (luar). Unsur tersebut baik faktor sosial, politik maupun ekonomi sangat mempengaruhi keadaan sastra yang berkembang. Hal ini sebagaimana ungkapan Ahmad al-Shayib yang memberikan pandangan tentang unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan karya sastra. Unsur-unsur tersebut yaitu tempat tinggal sastrawan, zaman di mana pengarang itu hidup, etnisitas, kontak dengan bangsa lain, agama, keadaan politik, dan sebagainya.[7] Di antara salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kesusastraan Arab, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu adanya kehidupan politik (*al-Hayah al-Siyasiyyah*) yang berkembang. Sebagaimana Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Khafaji di dalam bukunya *al-Shi'r al-Jahili* yang dikutip Akhmad Muzakki mengatakan bahwa sastra dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, seperti: (1) kesiapan naluri, (2) iklim, (3) karakteristik seseorang, (4) peradaban dan sosial, (5) kemajuan ilmu pengetahuan, (6) agama, (7) kehidupan politik, (8) kontak dengan bangsa lain, dan (9) peniruan. Semua faktor tersebut merupakan salah satu di antara faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan sastra.[8]

Menurut Sukron Kamil, relasi antara sastra dan politik dalam teori sastra dibahas dalam sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan ilmu yang membahas hubungan pengarang dengan

---

[6]Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 5-7.

[7]Ah}mad al-Shayib, *Ushul al-Naqd al-Adabi* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1964), Cet. Ke-7, 84-91.

[8]Akhmad Muzakki, *Kesusastraan Arab: Pengantar dan Teori*, 77-81.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Volume 9, Edisi 1, Januari-Juni 2017
P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

kelas sosial, status sosial dan ideologi, kondisi ekonomi, dan segmen pembaca yang ditujunya. Maka dengan demikian, karya sastra baik isi maupun bentuknya terkondisikan oleh lingkungan dan kekuatan sosial pada periode tertentu.[9] Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh Faruk, bahwa sosiologi sastra berkaitan erat dengan manusia dan lingkungannya. Menurut Faruk, sosiologi tidak hanya mempelajari manusia sebagai makhluk biologis semata, tetapi keterkaitan manusia dengan individu lain, manusia yang hidup dalam lingkungan dan berada dalam lingkungan manusia yang lainnya.[10] Dengan demikian, sosiologi sastra yang merupakan penciptaan (produksi) suatu karya sastra erat kaitannya dengan kondisi sosial atau realitas masyarakat yang mempunyai hubungan dengan fenomena dan kondisi lingkungan yang melatarbelakangi terciptannya karya sastra. Selain itu, sosiologi sastra menghasilkan pandangan bahwa karya sastra adalah ekspresi dan bagian dari masyarakat sehingga memiliki keterkaitan resiprokal dengan berbagai jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut.

Relasi sastra dan politik terlihat jelas pada periode kekuasaan pemerintahan Dinasti Umayyah, politik sangat mendominasi perkembangan sastra khususnya puisi. Hal ini disebabkan oleh pergolakan dan kecenderungan politik yang lebih mendominasi kehidupan masyarakatnya. Selain itu, keadaan kehidupan pada masa ini jauh berbeda dengan keadaan kehidupan pada masa sebelumnya, baik itu masa Jahiliyyah maupun pada masa *shadr al-Islam* (awal Islam). Selain agamanya berbeda, kondisi sosial dan kehidupan politik juga mengalami perubahan dan perkembangan. Adanya perkembangan dan pembaharuan dalam kehidupan sosial dan politik pada masa Dinasti Umayyah,

---

[9]Sukron Kamil, "Sastra, Islam, dan Politik: Studi Semiotik terhadap Novel Aulad Haratina Najib Mahfuz" (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 67.

[10]Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. Ke-2, Edisi Revisi, 17.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088   E-ISSN: 2599-2023

maka secara tidak langsung berimplikasi terhadap kondisi sastra yang muncul serta berimplikasi juga terhadap para penyair, karena kehidupan para penyair merupakan manifestasi dari kehidupan sosial dan politik.[11]

Islam bukanlah semata-mata mengatur keimanan dan ritual ibadah, tetapi juga mengatur tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek, baik masyarakat, politik, ekonomi, pendidikan, maupun hukum, dan sebagainya. Beberapa sarjana Barat berpendirian bahwa Islam juga mengatur masalah-masalah yang menyangkut orang banyak, seperti V. Fitzgerald menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata sebuah agama, tetapi juga merupakan sebuah sistem politik. Sedangkan C.A. Nallino berpendapat, bahwa Nabi Muhammad saw telah membangun dalam waktu yang bersamaan agama dan negara. Begitu pun R. Strothmann menyatakan bahwa Islam adalah sebuah fenomena agama dan politik, karena peletak dasar kehidupan agama dan politik adalah Nabi saw, yang merupakan seorang politikus sekaligus juga seorang negarawan sejati.[12]

Kekuasaan politik dalam sejarah Islam berperan untuk mewujudkan perintah dan ajaran agama. Masalah politik pada dasarnya adalah persoalan mengatur umat atau orang banyak dalam konteks kekuasaan agar menjadi baik dalam kehidupan yang aman dan sejahtera sebagaimana politik yang diterapkan Nabi saw di Madinah. Bentuk kekuasaan yang diciptakan oleh Nabi adalah kekuasaan yang berlandaskan keadilan, persamaan hak dan kewajiban serta kekuasaan yang tidak bersifat absolut atau otoriter.

Maka dapat kita ketahui, bahwasanya tidak akan terjadi politik tanpa adanya suatu kekuasaan, dan rakyat atau masyarakat. Namun, politik yang dimaksud dalam hubungannya dengan sastra, yakni sebagaimana pandangan Terry Eagleton. Menurut Eagleton, yang dimaksud dengan politik itu aneka siasat dan tingkah laku

---

[11]Males Sutiasumarga, *Kesusastraan Arab Asal Mula dan Perkembangannya* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 57.

[12]Sya'ban H. Muhammad, "Kekuasaan dalam Perspektif Islam" *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 10 No. 2, (2008): 182-183.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

yang memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan sosial. Politik yang dimaksudkannya bukanlah sebagai ilmu atau praktik penyelenggaraan lembaga pemerintah, alat-alat negara, dan sebagainya, tetapi pengertian politik yang menekankan maknanya sebagai kekuasaan atau kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkahlaku seorang atau sekelompok orang.[13] Konsep politik kekuasaan yang dikemukakan Eagleton, memiliki kesamaan pandangan dengan Miriam Budiardjo dalam konsep kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan merupakan bentuk kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkahlaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pelaku.[14]

Teuku Ibrahim Alfian di dalam bukunya *Sastra Sebagai Arena Pertarungan Politik* juga menyebutkan politik sebagai hal yang berkaitan dengan kekuasaan atau *power*. Kata *power* di sini diartikan sebagai kekuasaan, kekuatan, dan daya. Untuk mempertahankan kekuasaan politik, maka para pelaku politik beserta para simpatisannya menggunakan segala bentuk cara untuk mencapai tujuan politiknya.[15] Jadi dapat dikatakan, bahwasanya politik itu merupakan seni dan metode untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau suatu kelompok tertentu dengan kekuasaan dan kekuatan. Politik dalam kaitannya dengan sastra yaitu politik kekuasaaan, dimana dengan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang mampu mempertahankan dan mempengaruhi orang lain melalui kekuasaannya tersebut.

Pasca pemerintahan khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib, kekuasaan Islam berpindah ke tangan Bani Umayyah. Pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan rezim pemerintahan

[13]Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 122.

[14]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. Ke-27, 10.

[15]Teuku Ibrahim Alfian, *Sastra sebagai Arena Pertarungan Politik* (Yogyakarta: Qalam, 2003), 173-175.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

Islam yang dikuasai oleh kalangan dari keluarga Bani Umayyah.[16] Dinasti Umayyah mulai berkuasa pada tahun 41-132 H/661-750 M atau selama ± 90 tahun. Khalifah pertama dan sekaligus sebagai pendiri Dinasti Umayah adalah Mu‘awiyah ibn Abi Sufyan dan khalifah terakhir yaitu Marwan ibn Muhammad. Dinasti ini terdiri dari 14 orang khalifah dan terdapat beberapa orang khalifah Dinasti Umayyah yang paling berpengaruh selama pemerintahannya.

Periode ini sejak awal berdirinya kekuasaan pemerintahan, selalu mengalami gejolak dan pertikaian politik yang luar biasa antara pemerintahan Umayyah dengan oposisinya, pemberontakan terhadap penguasa dan khalifah.[17] Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan ini disebabkan oleh tata aturan dan kebijakan politik yang mengalami pergeseran dari masa sebelumnya. Perubahan yang menonjol antara lain, sistem pergantian khalifah, pemindahan ibukota kekuasaan, kepemimpinan dikuasai oleh mayoritas kalangan militer Arab, dan ekspansi militer telah meluas sampai ke Eropa.

Dengan demikian, selama periode ini telah terjadi strategi baru untuk merekontruksi otoritas dan sekaligus kekuasaan khalifah, serta mengimplementasikan faham golongan dengan elit kekuasaan.[18] Dengan demikian, kekuasaan Arab menjadi sentralisasi monarkis, yang menyebabkan peralihan kekuasaan secara turun temurun di kalangan keluarga

---

[16]Pemerintahan Dinasti Umayyah dikategorikan pada periode klasik, sebagaimana Harun Nasution membagi sejarah Islam kepada tiga periode, yaitu: 1) Periode Klasik (650-1250 M) terdiri dari masa kemajuan Islam I (650-1000 M) dan masa disintegrasi (1000-1250 M). 2) Periode Pertengahan (1250-1800 M), periode ini terbagi pada dua masa, masa kemunduran I (1250-1500 M) dan masa tiga kerajaan besar (1500-1800 M), yang terdiri dari dua fase, yaitu fase kemajuan (1500-1700 M) dan fase kemunduran II (1700-1800 M). 3) Periode Modern 1800 M-sekarang), periode modern disebut juga masa kebangkitan Islam. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), Cet. Ke-5, Jilid 1,50.

[17] Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009), 52. Lihat juga Yazid. Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), 69.

[18]Siti Maryam (ed), *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2004), Cet. Ke-2, 67.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

(*monarchiherindentis*).[19] Dengan politik kekuasaan yang dijalankan oleh Mu‘awiyah tersebut menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa faksi dan sekte politik yang memiliki perbedaan pandangan dalam konsep kekhalifahan. Adapun faksi politik di masa pemerintahan Dinasti Umayyah, di antaranya: (1) Bani Umayyah, para pendukungnya disebut Sunni[20] (2) Shi>‘ah, para pendukung ‘Ali ibn Abi Talib, (3) Khawarij, sekte politik yang menyatakan keluar dari kepemimpinan ‘Ali ibn Abi Talib pasca peristiwa *tahkim* (*arbitrase*), (4) Zubayriyyun, para pendukung ‘Abdullah ibn al-Zubayr.[21]

Faksi-faksi politik ini selalu mengalami perselisihan dan pertikaian politik, baik sesama oposisi maupun dengan Bani Umayyah, sehingga mengancam kekuasaan pemerintahan. Manuver-manuver politik yang dilancarkan oleh pihak oposisi, seperti Shi‘ah, Khawarij, dan Zubayriyyun maupun dari pihak Dinasti Umayyah sendiri, tidak hanya terjadi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan saja, namun pergolakan politik sudah merambah ke dalam dunia sastra. Kesusastraan Arab khususnya puisi pada masa Dinasti Umayyah mempunyai kekhasan tersendiri. Hal ini terlihat dari kondisi sosial politik masyarakatnya tidak lagi bertumpu pada suku-suku, seperti pada masa Jahiliyyah, Islam atau Kafir, seperti pada masa permulaan Islam, akan tetapi masyarakatnya berbentuk kelompok, sekte, dan partai politik.

Dengan demikian, fungsi dari sastra khususnya puisi mengalami perubahan sesuai dengan keadaan situasi politik yang terjadi. Dengan perubahan kondisi sosial politik tersebut menyebabkan puisi pada masa ini tumbuh subur, dan perkembangan puisi juga disebabkan adanya perhatian dari para khalifah (patron) terhadap sastra, kecintaan mereka pada puisi,

---

[19]Rasul Ja’fariyan, *Sejarah Para Pemimpin Islam: dari Imam Ali sampai Monarki Mu’awiyah* (Jakarta: al-Huda, 2010), Cet. Ke-1, 355.

[20]Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, 87.

[21]Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet. Ke-3, 183. 218. 244.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

terutama puisi-puisi yang bertemakan pujian dan sanjungan. Sastra pun dijadikan sebagai alat politik, kecenderungan sastra terhadap politik ini dapat dilihat dari dua fenomena: *pertama*, munculnya faksi-faksi politik pasca perang Siffin, dan *kedua*, hubungan yang erat terjalin antara penguasa dan penyair untuk menghadapi faksi politik dan melegitimasi kekuasaan serta para penguasa pun bersikap dermawan dengan memberikan hadiah kepada para penyair.[22] Selain itu, perkembangan sastra pada masa ini juga dilatarbelakangi oleh peranan dan kontribusi beberapa kota tempat tumbuh dan berkembangnya sastra, seperti Hijaz, Irak, dan Syam. Kota-kota ini menjadi pusat kegiatan sastra periode Dinasti Umayyah.

Meskipun unsur politik merupakan salah satu yang menyebabkan perkambangan sastra, namun tetap saja sebagian sastrawan tidak setuju akan keterkaitan puisi dan politik dalam sastra, karena mereka beralasan bahwa sastra bersifat otonom yang tidak dipengaruhi oleh keadaan politik dalam karya yang diciptakan. Salah satu kelompok yang menolak keberadaan tersebut, antara lain Formalisme Rusia yang merupakan kelompok yang menolak keberadaan politik dalam karya sastra. Mereka hanya mengarahkan perhatian sepenuhnya pada bentuk karya sastra itu sendiri dan mengesampingkan aspek-aspek biografi, psikologis, ideologis, dan sosiologis untuk melakukan pendekatan dalam memahami karya sastra.[23] Bagi Formalisme, karya sastra bukanlah alat untuk menyampaikan ide-ide, refleksi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat atau penjelmaan nilai-nilai kebenaran yang sukar dipahami. Akan tetapi, karya sastra adalah kenyataan itu sendiri dan keliru jika melihatnya sebagai ekspresi penulisnya.[24] Namun, pandangan dari tokoh Formalisme diyakini kurang memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai karya sastra, sehingga

---

[22]Sukron Kamil, "Sastra, Islam, dan Politik: Studi Semiotik terhadap Novel Aulad Haratina Najib Mahfuz", 346.

[23]Mohammad A. Syuropati dan Agustina Soebachman, *7 Teori Sastra Kontemporer dan 17 Tokohnya* (Yogyakarta: In Azna Books, 2012), 11.

[24]Atmazaki, *Ilmu Sastra: Teori dan Terapan*, 21.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088   E-ISSN: 2599-2023

muncul Strukturalisme sebagai bentuk kritik atas ketidakpuasan terhadap pandangan Formalisme. Dalam perkembangannya, Strukturalisme mengalami pembaharuan sampai pada munculnya Strukturalisme Genetik yang memiliki implikasi yang lebih luas dalam struktur sosial dalam masyarakat. Strukturalisme Genetik ini digagas oleh Lucien Goldmann, menurutnya karya sastra merupakan sebuah struktur. Namun, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung.[25] Secara definitif, Strukturalisme Genetik menganalisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap asal usul karya, sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik.[26]

Perdebatan mengenai penolakan sastra dan politik juga dikemukakan oleh George Orwell, sastrawan penting abad ke-20. Menurutnya, pengarang hanya harus terlibat pada satu hal saja yakni sastra, dan ia keberatan pengarang harus mengabdi pada alasan politik,[27] dengan kata lain sastrawan dipengaruhi oleh situasi politik. Hal senada juga diungkapkan oleh Goenawan Mohamad dari kalangan Manifes Kebudayaan. Menurut Goenawan, seorang penyair atau sastrawan hanya memfokuskan dirinya terhadap sastra semata. Jika sastra harus mengabdi kepada politik, pada akhirnya sastrawan tidak bertanggungjawab kepada dirinya, tetapi kepada rekan dan pemimpinnya. Oleh sebab itu, mereka menolak komandoisme dalam sastra dan menolak semboyan politik sebagai panglima serta menolak pendirian sastra harus terlibat dalam politik, sebab jika demikian maka yang lahir adalah kepalsuan. Ia juga menegaskan pentingnya komitmen sosial yang dipancarkan dalam sastra, tetapi menolak sastra untuk melayani penguasa.[28]

---

[25]Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme* , 123.

[26]Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. Ke-11, 121-123.

[27]Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 122.

[28]Goenawan Mohamad, *Kesusastraan dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 63.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

Kehidupan politik yang terjadi pada periode pemerintahan Dinasti Umayyah menyebabkan munculnya berbagai faksi atau sekte yang saling menghujat dan menghantam dengan kata-kata dengan membeli lisan para penyair yang digunakan sebagai politik kekerasan dan tipu daya untuk memperoleh kekuasaan. Seiring dengan munculnya faksi atau sekte politik, muncul pula para penyair yang mendukung beberapa sekte politik, seperti al-Kumayt ibn Zayd yang mendukung Shi‘ah (*ahl al-bayt*), al-Qitry ibn al-Faja‘ah pendukung Khawarij, al-Akhthal dan al-Farazdaq pendukung Bani Umayyah, dan al-Nabighah al-Ja‘diy pendukung ‘Abdullah ibn al-Zubayr. Dukungan dan kesetiaan penyair terlihat dari puisi-puisi yang diungkapkan oleh mereka sebagai bentuk loyalitasnya terhadap penguasa. Salah satu bentuk dukungan penyair terhadap sektenya, seperti puisi al-Kumayt yang menghujat Bani Umayyah dan membela keluarga Bani Hashim:

فقل لبنى أمية حيث حلوا   وإن خفت المنهد والقطيعا

أجــاع الله من أشبعتمـوه   وأشبع من بجوركم أجيعا

بمرضيّ السياسة هـاشمى   يكـون حيـا لأمته ربيعـا[٢٩]

Katakanlah pada Bani Umayyah di mana mereka bebas, dan apabila engkau takut untuk bangkit kembali dan melukai. Allah akan melaparkan orang-orang yang mengenyangkan dirinya sendiri. Dan mengenyangkan orang-orang di sekelilingnya yang kelaparan dengan penyakit politik dari Bani Hashim yang menjadi kehidupan bagi sekumpulan umat manusia.

Puisi di atas menunjukkan keutamaan keluarga Bani

[29]Ah}mad al-Iskandari, *al-Wasith fi al-Adab al-‘Arabi wa Tarikhihi*, 182.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

Hashim dibandingkan keluarga Bani Umayyah, adanya bentuk muatan-muatan politis yang terdapat dalam puisi tersebut, sehingga dapat dikatakan antara puisi dan politik memiliki kaitan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan, sastra memiliki kaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa tersebut. Hal ini sebagaimana pandangan Hippolyte Taine (1766-1817), seorang tokoh kritikus Perancis sebagai peletak dasar sosiologi modern. Taine berpendapat bahwa karya sastra merupakan faktor yang dipengaruhi oleh ras, *moment*, dan lingkungan. Begitu juga dengan Fredric Jameson, ia berpendapat bahwasanya setiap teks sastra terdapat resonansi sosial, historis, dan politik yang berpengaruh.[30] Akan tetapi, dengan masuknya aspek politik ke dalam sastra (puisi), maka tujuan dari sastra itu tidak lagi menjadi sebuah seni sastra yang lahir dari ungkapan pengalaman, perasaan dan imajinasi penyair semata, melainkan seni sastra yang orientasinya untuk kepentingan politis dari tindakan reaktif atas perkembangan kehidupan politik yang terjadi. Dengan demikian, peranan puisi pada masa itu tak ubahnya seperti media massa yang menjadi alat propaganda politik dan komersialisasi.

Dengan pergolakan politik yang terjadi juga berdampak terhadap tema-tema puisi yang muncul. Oleh karena itu, perkembangan tema-tema puisi dari masa ke masa mengalami perubahan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dan keadaan zamannya. Begitu juga perkembangan tema puisi pada masa Dinasti Umayyah, tema-tema puisi pada ini sebagiannya terdapat tema-tema terdahulu yang masih dipakai, namun juga terdapat pembaharuan dan corak baru tema puisi, seperti tema puisi politik (*al-siyasi*) dan puisi polemik (*al-naqaid*). Namun demikian, ada sebagian ahli sastra yang menyatakan bahwa puisi yang bertemakan dakwah dan kemenangan Islam (*shi'r al-futuh wa al-da'wah al-Islamiyyah*) juga mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Jenis puisi ini banyak mendeskripsikan jihad di jalan Allah, sehingga para

[30]Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*, 114-115.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

pejuang dituntut untuk bersikap sabar dan penuh keyakinan. Namun tema-tema puisi yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan politik yang terjadi pada saat itu. Maka tidak bisa dipungkiri, bahwa puisi digunakan untuk tujuan membela kepentingan kelompok (sekte) dan kekuasaan, serta puisi sudah menjadi barang komoditas (*takassub bi al-shi'r*) yang selalu diperdagangkan.[31]

Pada periode Umayyah terdapat tiga penyair handal dan memiliki peran yang signifikan dibandingkan dengan para penyair lainnya di masa ini. Tiga penyair handal tersebut antara lain, al-Akht}al, al-Farazdaq, dan Jarīr yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan kesusastraan Arab, khususnya puisi yang sangat digemari oleh para bangsawan Arab Bani Umayyah. Dalam hal ini, para bangsawan menyambut dengan senang hati setiap perubahan dalam model dan gaya berpuisi. Untuk itu, pada masa Umayyah tugas utama penyair istana *(poet of court)* adalah menggubah puisi yang mengisahkan tentang keberhasilan atau prestasi yang telah dicapai oleh para pembesar kerajaan (khalifah) dan mengabadikan nama mereka di dalam puisi mereka tersebut.[32] Dimata para penyair, puisi sebagai sumber penghidupan bagi mereka dalam mencari nafkah dan para penyair pada masa Dinasti Umayyah tidak ubahnya seperti pers di masa sekarang ini.[33] Selain itu, peran dan fungsi penyair antara lain sebagai legitimator kekuasaan, *public relation* bagi para khalifah, kritikus penguasa, dan sebagai responden bagi rakyat.

Setiap penyair tidak terlepas dari fungsi politis, mereka setia mendukung sekte atau partai politiknya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga yang harus berlaku munafik dengan mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, menentang perasaan sendiri demi penguasa dan

---

[31]Ahmad al-Iskandari, *al-Wasit fi al-Adab al-'Arabi wa Tarikhihi*, 151.

[32]Fadhil Munawwar Mansur, *Perkembangan Sastra Arab dan Teori Sastra Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. Ke-1, 11.

[33]Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), Cet. Ke-1, 316.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

keselamatan, atau demi mengharapkan imbalan dari para khalifah. Perkembangan puisi juga dikarenakan banyaknya para penyair dari kelompok atau partai-partai politik yang muncul pada saat itu, sehingga muncullah tujuan baru dari puis-puisi tersebut, yaitu puisi yang bertemakan politik. Para penyair Bani Umayyah berusaha untuk melegitimasi kekuasaan khalifah dengan memasukkan aura keagamaan ke dalam puisi-puisi politik mereka, seperti puisi al-Farazdaq yang memuji Yazid ibn Mu'awiyah dengan mengisyaratkan bahwa para khalifah Bani Umayyah adalah pemimpin pilihan Tuhan untuk umat Islam, dan akan mendapat pertolongan dari-Nya, meskipun Yazid memiliki kepribadian yang buruk suka berfoya-foya dan bergelimang kemewahan. Sebagaimana puisi al-Farazdaq:

ولو كان بعد المصطفى من عباده نبيّ لهم منهم لأمر العزائم

لكنت الذى يختاره الله بعده لحمل الأمانات الثّقال العظائم

ورثتم — خليل الله — كلّ خزانة وكلّ كتاب بالنبوة قائم[٣٤]

Jika ada nabi setelah Nabi Muhammad saw dari hamba Allah untuk mengurus persoalan, tentunya engkaulah yang dipilih Allah agar menanggung amanah berat tetapi agung, engkau pewaris seluruh kekayaan (peradaban), pewaris seluruh kitab para khali>l Alla>h dan pelaksana kenabiannya.

Puisi di atas merupakan pujian al-Farazdaq kepada Yazid, yaitu memuliakannya dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Bani Umayyah adalah seorang pemimpin dan pengatur negara. Dia juga mengatakan, bahwa Bani Umayyah adalah orang-orang yang selalu menjunjung kebenaran, dan pelindung bagi kaum muslimin.

---

[34]Ahmad Muhammad al-Khufi, *Adab al-Siyasah fi al-'Ashr al-Umawi*, 174.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Volume 9, Edisi 1, Januari-Juni 2017
P-ISSN: 2339-2088 E-ISSN: 2599-2023

Dalam puisi ini, al-Farazdaq mengatakan bahwa Allah telah memilih Bani Umayyah sebagai khalifah, jika ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka Yazid adalah nabi berikutnya sebagai *khalil Allah*. Puisi tersebut terlihat adanya unsur politis dengan membela dan menyanjung kekhalifahan Bani Umayyah. Dalam puisi al-Farazdaq yang mengagungkan Bani Umayyah terlihat jelas adanya hubungan resiprokal (timbal balik) antara penyair dan penguasa.

Maka tidak dapat dipungkiri, bahwa relasi puisi dan politik dapat terjadi melalui patron. Sebagaimana teori patronase yang kemukakan oleh Diana Laurenson dalam sosiologi sastra. Laurenson lebih menitikberatkan hubungan sastra dengan politik terjadi melalui patronnya. Ia mengungkapkan, bahwasanya relasi antara sastra dengan politik sangat kuat melalui patronase. Menurutnya, ada tiga jenis patronase dalam kesusastraan, yaitu: *pertama*, hubungan antara sastrawan dan patron bersifat pribadi. *Kedua*, hubungan antara sastrawan dan patron cenderung lebih renggang. Dan *ketiga*, hubungan antara sastrawan patron bersifat tidak langsung, dimana sang patron hanya sebagai seorang mediator antara sastrawan dengan publiknya.[35]

Dengan kebijakan politik dan corak pemerintahan, undang-undang atau aturan yang ditetapkan, gaya kepemimpinan penguasa, bahkan mazhab atau aliran yang dianut oleh pemerintah, serta gerakan-gerakan oposisi yang menentang kebijakan pemerintahan secara tidak langsung berdampak terhadap karya sastra. Oleh karena itu, perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya, baik sosial maupun politik. Artinya, konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa.

[35]Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, 123.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

C. Penutup

Perkembangan sastra tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur yang membelatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya sebuah karya sastra, karena pada dasarnya karya sastra tersebut dipengaruhi oleh unsur intrinsik (dalam) dan unsur ekstrinsik (luar). Unsur tersebut baik faktor sosial, politik maupun ekonomi sangat mempengaruhi keadaan sastra yang berkembang.

Relasi sastra dan politik terlihat jelas pada periode kekuasaan pemerintahan Dinasti Umayyah, politik sangat mendominasi perkembangan sastra khususnya puisi. Hal ini disebabkan oleh pergolakan dan kecenderungan politik yang lebih mendominasi kehidupan masyarakatnya.

Kehidupan politik yang terjadi pada periode pemerintahan Dinasti Umayyah menyebabkan munculnya berbagai faksi atau sekte yang saling menghujat dan menghantam dengan kata-kata dengan membeli lisan para penyair yang digunakan sebagai politik kekerasan dan tipu daya untuk memperoleh kekuasaan. Seiring dengan munculnya faksi atau sekte politik, muncul pula para penyair yang mendukung beberapa sekte politik, seperti al-Kumayt ibn Zayd yang mendukung Shi‘ah (*ahl al-bayt*), al-Qithry ibn al-Faja‘ah pendukung Khawarij, al-Akhthal dan al-Farazdaq pendukung Bani Umayyah, dan al-Nabighah al-Ja‘diy pendukung ‘Abdullah ibn al-Zubayr. Dukungan dan kesetiaan penyair terlihat dari puisi-puisi yang diungkapkan oleh mereka sebagai bentuk loyalitasnya terhadap penguasa.

Setiap penyair tidak terlepas dari fungsi politis, mereka setia mendukung sekte atau partai politiknya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga yang harus berlaku munafik dengan mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, menentang perasaan sendiri demi penguasa dan keselamatan, atau demi mengharapkan imbalan dari para khalifah.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Teuku Ibrahim. 2003. *Sastra sebagai Arena Pertarungan Politik.* Yogyakarta: Qalam.

Atmazaki. 2007. *Ilmu Sastra Teori dan Terapan.* Padang: UNP Press.

Ibn al-Athir. 1979. *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*. t.tp: Dar al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz II.

Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-27.

Dhayf, Shawqi. t.th. *Tarikh al-Adab al-‘Arabi al-‘Asr al-Jahili.* Kairo: Dar al-Ma‘arif, Cet. Ke-24.

al-Fakhuri, Hanna. 1987.*Tarikh al-Adab al-‘Arabi.* t.tp: Maktabah al-Bulisiyah, Cet. Ke-12.

Fananie, Zainuddin. 2001. *Telaah Sastra.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, Cet. Ke-2.

Faruk. 2012. *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, Edisi Revisi.

Hasan, Hasan Ibrahim. 2011. Sejarah dan Kebudayaan Islam 2. Jakarta: Kalam Mulia, Cet. Ke-3.

Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika.* Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1.

Hitti, Philip K. 2013. History of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet. Ke-1.

al-Iskandari, Ahmad dan Mushthafa ‘Inani. 1952. *al-Wasith fi al-Adab al-‘Arabi wa Tarikhihi.* Kairo: Dar al-Ma’arif, Cet. Ke-17.

Ja’fariyan, Rasul. 2010. Sejarah Para Pemimpin Islam: dari Imam Ali sampai Monarki Mu’awiyah. Jakarta: al-Huda, Cet. Ke-1.

Kamil, Sukron. 2009. *Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DOI: https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134

--------------------. 2007. “Sastra, Islam, dan Politik: Studi Semiotik terhadap Novel Aula>d Ha>ratina> Naji>b Mah}fu>z”. Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

al-Khufi, Ahmad Muhammad. 1979. *Adab al-Siyasah fi al-‘Asr al-Umawi* . Kairo: Dar al-Nahdhah al-Misri, Cet. Ke-5.

Lapidus, Ira M. 1999. Sejarah Sosial Ummat Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.

Mansur, Fadhil Munawwar. 2011. Perkembangan Sastra Arab dan Teori Sastra Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1.

Maryam, Siti (ed). 2004. *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik hingga Modern.* Yogyakarta: LESFI, Cet. Ke-2.

Mohamad, Goenawan. 1993. Kesusastraan dan Kekuasaan. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mufrodi, Ali. 1997. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos

Muhammad, Sya’ban H. 2008. “Kekuasaan dalam Perspektif Islam”. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 10 No. 2.

al-Muhdar, Yunus Ali dan H. Bey Arifin. 1983. *Sejarah Kesusastraan Arab*. Surabaya: Bina Ilmu.

Muzakki, Akhmad. 2006. *Kesusastraan Arab: Pengantar dan Teori*. Jakarta: ar-Ruzz Media.

Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* Jakarta: UI Press, Cet. Ke-5, Jilid 1.

Ratna, Nyoman Kutha. 2012. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-11.

Semi, M. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra.* Bandung: Angkasa, Edisi Revisi.

Sutiasumarga, Males. 2001. *Kesusastraan Arab Asal Mula dan Perkembangannya*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Syuropati, Mohammad A. dan Agustina Soebachman.2012. 7 Teori Sastra Kontemporer dan 17 Tokohnya. Yogyakarta: In Azna Books.

Teeuw. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, Cet. Ke-1.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-4, Edisi III.

al-Zayyat, Ahmad Hasan. 2001. *Tarikh al-Adab al-'Arabi.* Beirut: Dar Maktabah al-Hayah.